

## BAB IV

### KONSTRUKSI KEKUASAAN DALAM BUKU PELAJARAN SOSIOLOGI SMA BERDASARKAN KURIKULUM 2006 DAN 1984

#### 4.1 Pengantar

Bab sebelumnya sudah menjelaskan bagaimana wacana-wacana dominan dalam Kurikulum SMA yang dikeluarkan Depdikbud/Depdiknas maupun BSNP merefleksikan sebagai pertarungan kekuasaan. Dalam studi ini sebagaimana menjadi karakteristik CDA, teks-teks yang tersaji dalam kurikulum tidak dianggap sebagai sesuatu yang bebas nilai, alamiah dan menjadi gejala tunggal. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, wacana-wacana dominan yang menjadi artikulasi kekuasaan dalam Kurikulum Sosiologi SMA diantaranya Keteraturan Sosial, Modernisasi, Kemajuan Material Pembangunan, dan sebagainya. Wacana-wacana dominan tersebut diproduksi oleh negara sebagai bentuk kontrol dan dominasi kelompok penguasa dalam ranah pendidikan.

Jika bab sebelumnya membongkar konstruksi kekuasaan dalam kurikulum Sosiologi yang dikeluarkan oleh Depdikbud/Depdiknas maupun BSNP, bab ini juga berupaya menjelaskan bagaimana buku pelajaran Sosiologi menjadi pertarungan kekuasaan yang memproduksi realitas dan wacana dikalangan kelompok masyarakat lainnya. Unit analisa yang digunakan dalam upaya tersebut adalah buku teks pelajaran Sosiologi sejak Kurikulum 1984, 1994, 2004 maupun 2006. Buku teks yang digunakan adalah buku terbitan PT. Galaxy Puspa Mega (selanjutnya GPM). Buku ini dijadikan sebagai unit analisa karena dianggap sebagai salah satu buku perintis Sosiologi sejak 1984. Salah satu penulisnya menuturkan :

“sebelum buku ini terbit, bentuknya diktat stensilan yang dijual dari mulut mulut untuk guru-guru Sosiologi se Jakarta. Larisnya seperti kacang goreng. Kami yang langsung menjual dan mengedarkannya ke guru-guru. Keberadaan MGMP sangat berperan penting dalam peredaran buku tersebut”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara Drs. Daniel Fernandez, M.Si, salah seorang penulis buku, 8 Mei 2008

Berdasarkan pengamatan peneliti, buku yang dijadikan unit analisis ini banyak digunakan di berbagai sekolah sejak kurikulum Sosiologi diajarkan di SMA. Hal itu didasarkan dari penelusuran dan diskusi peneliti dengan beberapa guru Sosiologi SMA di beberapa sekolah di Jakarta. Mereka banyak menyodorkan buku Sosiologi terbitan Galaxy Puspa Mega kepada peneliti terutama terbitan 1984 hingga akhir 1990. Analisa bab ini menggunakan *framing* pendekatan Gamson dan Modigliani. Dalam pandangan Gamson, framing dipahami sebagai seperangkat gagasan atau ide sentral ketika seseorang atau media memahami dan memaknai suatu isu<sup>2</sup>. Dalam pandangan Eriyanto, ide sentral tersebut akan didukung oleh perangkat wacana lain sehingga antara satu wacana dengan wacana lain saling kohesif (saling mendukung). Di bagian akhir akan tampak bagaimana teks-teks yang tersaji dalam buku pelajaran mencerminkan pertarungan dan dominasi kekuasaan.

## 4.2 Analisis Buku Pelajaran Sosiologi SMA

### 4.2.1 Analisis Buku Pelajaran Sosiologi SMA Kurikulum 2006

Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, kurikulum 2006 merupakan revisi terhadap Kurikulum 2004. Ciri khas utama Kurikulum 2004 ini tidak lagi mendepankan wacana pembangunan sebagai rujukan pembahasannya. Kurikulum ini dilansir pada saat Mendiknas diduduki Bambang Sudibyo pada kabinet Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Bagian ini akan menjelaskan analisis teks buku pelajaran Sosiologi berdasarkan Kurikulum 2006 dengan tema: *Perkembangan Kelompok Sosial*. Analisa ini hanya mengambil salah satu materi yang tersaji dalam buku pelajaran Sosiologi terbitan GPM. Bagian ini terdiri atas beberapa bagian yaitu 1) Pengantar, 2) Hubungan Antarkelompok dan Perkembangannya, 3) Dinamika Multikultural, 4) Mengatasi Permasalahan Multikulturalisme.

#### *Idea Element*

Dalam pandangan GPM, kelompok sosial dipahami sebagai entitas dalam masyarakat yang terus berubah seiring dengan dinamika yang terjadi pada masyarakat. Hal tersebut dijelaskan dalam teksnya :

<sup>2</sup> Eriyanto (2002). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS, hal. 226.

“harus dipahami bahwa dinamika kelompok-kelompok sosial yang ada makin beragam;ada yang masih bersifat fluktuatif (naik-turun), ada kelompok-kelompok yang bertahan pada kemapanan (stabil), atau bahkan telah mengerucut menjadi kelompok yang kuat dan solid. Sebagian kelompok masih bersifat eksklusif (berorientasi ke dalam), sebagian lainnya bersifat inklusif (berorientasi ke luar)”<sup>3</sup>

Berdasarkan teks tersebut, GPM ingin menjelaskan bahwa keberadaan kelompok sosial tidak dapat dipisahkan dari kompleksitas masyarakat yang ada, khususnya kondisi masyarakat yang multikultural. Masyarakat multikultural dipahami sebagai sebuah realitas sosial atas keanekaragaman berbagai kelompok masyarakat yang memiliki karakteristik berbeda. Berdasarkan kenyataan tersebut, GPM mendefinisikan multikultural sebagai hal yang berkenaan dengan lebih dari dua kebudayaan. GPM juga menjelaskan bahwa masyarakat multikultural disebut juga masyarakat majemuk. Dalam teks tersebut, GPM juga menjelaskan bahwa keberadaan kelompok sosial dilihat berdasarkan pola-pola interaksi yang dilakukannya. Dalam kasus Indonesia, misalnya, GPM memberikan penjelasan bahwa keberadaan kelompok sosial dapat membantu terciptanya solidaritas sosial. GPM menulisnya :

“berbagai bencana yang terjadi jelas mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan. Namun, satu hal positif yang menggembirakan adalah munculnya solidaritas missal yang datang dari seluruh pelosok negeri. Perasaan sebagai saudara satu bangsa melahirkan kepedulian yang membanggakan. Paham-paham kesukuan mendadak hilang, tidak ada lagi sekat kesukuan/kedaerahan yang menghalangi tindakan solidaritas tersebut.”<sup>4</sup>

Berdasarkan teks tersebut, GPM menganggap konsep masyarakat multikultural sama dengan masyarakat majemuk. Melalui teks ini, GPM juga ingin menjelaskan bahwa masyarakat multikultural akan menciptakan satu kesatuan yang kokoh masyarakat Indonesia.

“meskipun dengan semboyan demikian (Bhinneka Tunggal Ika), bukan berarti di dalam masyarakat Indonesia yang multikultural itu tidak terjadi gejolak-gejolak yang mengarah kepada perpecahan segala bidang”<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Luth, Nursal dan Daniel Fernandez (2006). *Sosiologi untuk SMA/MA Kelas XI IPS*. Jakarta:Galaxy Puspa Mega, hal. 155

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> ibid

Teks itu memperlihatkan arti penting masyarakat multikultural dalam membangun integrasi sosial. Masyarakat yang berpenduduk banyak dan dengan kondisi geografis luas memang rentang dengan gejolak etnis maupun berbagai aksi separatistis, oleh karena GPM hendak meyakinkan bahwa keberadaan Indonesia sebagai masyarakat multikultural dapat meredam berbagai gejolak yang akan muncul dalam bingkai keanekaragaman. Pada sisi ini sebenarnya, pemerintah belajar dari konflik etnis dan SARA yang muncul pasca Orde Baru tumbang. Potensi konflik tersebut sudah muncul sejak lama pada saat Orde Baru berkuasa, tetapi konflik tersebut diredam secara represif. Saat itu kecenderungan yang ada adalah perbedaan dinihalkan, tetapi persamaan dikedepankan sebagai kemasan (*packaging*) pembangunan.

Pada dasarnya materi ini merupakan kelanjutan dari materi masyarakat multikultural yang juga sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Materi ini juga sama dengan materi yang dibahas pada Kurikulum 2004. Hal tersebut sebenarnya dapat dipahami bahwa pasca Orde Baru tumbang, mencuat berbagai konflik horizontal yang berakar pada etnis, ras, ekonomi maupun politik. Materi ini pada dasarnya berkepentingan menanamkan nilai-nilai mendasar kepada masyarakat bahwa kelompok sosial yang baik adalah kelompok sosial yang bisa melahirkan persamaan dan berusaha meminimalisir perbedaannya. Dengan cara ini, pemerintah berkepentingan dalam mengontrol berbagai kelompok sosial yang dianggap bisa melahirkan berbagai konflik dan gejala disintegrasi sosial.

#### **Perangkat Pembingkai**

Dalam teks tersebut digunakan berbagai simbol untuk memberi kesan atau efek penonjolan makna. Salah satu caranya digunakanlah visual untuk mendukung teks yang digunakan GPM. Salah satu teks diantaranya adalah gambar nelayan yang dijelaskan sebagai salah satu ragam budaya yang hidup dalam masyarakat multikultural. Beberapa visual yang lain antara lain: 1) gambar pemain lenong bocah yang sedang menampilkan sebuah adegan. GPM menulisnya, "kelompok masyarakat Betawi di Jakarta masih mempertahankan kesenian khas mereka di antara banyak jenis kesenian yang berkembang di sekitarnya", 2) gambar-gambar yang lain diantaranya umat Hindu sedang merayakan hari besar agamanya, kesenian tradisional Barongsai, dan sebagainya.

Gambar-gambar tersebut sebagai penegas makna dibalik teks yang tersaji dalam buku digambarkan dibawah ini :

**Gambar 4.1 Komunitas Betawi**



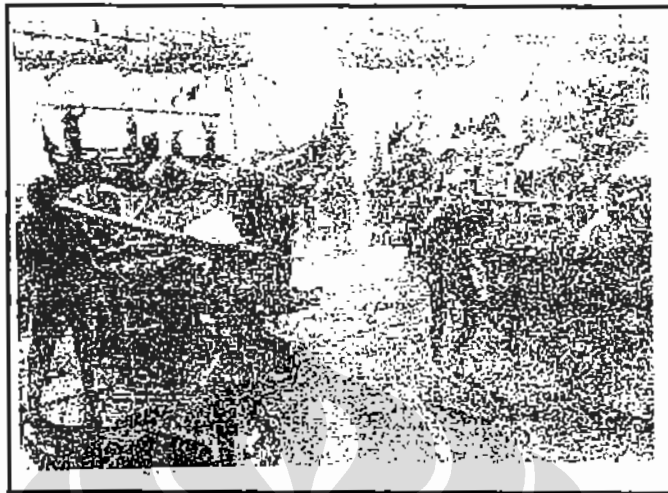
Sumber:Luth dan Fernandez (2006:156)

**Gambar 4.2 Barongsai sebagai Identitas China**



Sumber:Luth dan Fernandez (2006:158)

**Gambar 4.3 Masyarakat Nelayan**



Sumber: :Luth dan Fernandez (2006:155)

**Gambar 4.4 Perayaan Upacara Agama Umat Hindu**



Sumber: Luth dan Fernandez (2006:158)

Beberapa gambar tersebut pada dasarnya ingin menjelaskan dua hal penting. *Pertama*, berupaya mempertegas makna dibalik teks tersebut, bahwa berbagai kelompok sosial dihadapkan pada berbagai tantangan kehidupan masyarakat multikultural. *Kedua*, kelompok sosial merupakan agen penting dalam menciptakan keteraturan sosial menghadapi tantangan masyarakat multikultural.

### Perangkat Penalaran (*Reasoning Device*)

Gagasan atau tema yang ditonjolkan dalam wacana teks GPM dibangun dengan pembenar-pembenar tertentu. Menarik untuk menjelaskan GPM menempatkan kelompok sosial sebagai entitas penting dalam dinamika masyarakat multikultural. Untuk mendukung teks tersebut, GPM menggunakan *reasoning* antara lain menjelaskan perkembangan kelompok-kelompok sosial yang ada berdasarkan kriteria etnisitas, pluralisme, lintas jender. Strategi *roots* tersebut digunakan untuk memberi penalaran bahwa kelompok sosial menjadi agen penting dalam transformasi masyarakat multikultural. Selain itu, GPM juga memberi klaim-klaim moral tertentu (*appeals to principle*). Klaim moral itu antara lain dengan mengatakan bahwa kebudayaan dalam masing-masing etnik merupakan kekayaan yang tak ternilai dan perlu dipertahankan. Pembenaar tersebut dalam teks dipakai untuk menekankan kepada khalayak pembaca bahwa kelompok sosial memiliki kontribusi penting dalam membangun masyarakat multikultural.

<b>Frame:Kelompok Sosial Penting dalam Membangun Masyarakat Multikultural</b>	
<i>Framing Devices</i> (Perangkat Pembingkai)	<i>Reasoning Devices</i> (Perangkat Penalaran)
<i>Metaphors</i> :Jabatan dan kekayaan menjadi symbol pencapaian pada kelompok sosial tertinggi.Sedangkan sebagian orang lainnya masih berkuat pada persoalan perut dan kebutuhan hidup.	<i>Roots</i> : perkembangan kelompok-kelompok sosial yang ada berdasarkan kriteria etnisitas, pluralisme, lintas jender
<i>Catchphrases</i> :lintas batas, lintas teritorial, lintas generasi, lintas etnis, lintas agama, moderat, universal.	<i>Appeals to principles</i> : kebudayaan dalam masing-masing etnik merupakan kekayaan yang tak ternilai dan perlu dipertahankan
<i>Depiction</i> :Masyarakat terbuka versus masyarakat tertutup, inklusif versus eksklusif	<i>Consequences</i> :Perlakuan pemerintah yang tidak lagi diskriminatif terhadap kelompok sosial tertentu merupakan wujud keterbukaan pemerintah untuk melakukan reformasi/perubahan.
<i>Exemplar</i> : Indonesia sama dengan China dalam hal jumlah penduduk dan multikulturalisme.	
<i>Visual images</i> : gambar nelayan yang dijelaskan sebagai salah satu ragam budaya yang hidup dalam masyarakat multikultural	

#### 4.2.2 Analisis Buku Pelajaran Sosiologi SMA Kurikulum 1984

Kurikulum 1984 merupakan kurikulum hasil revisi Kurikulum 1975. Kurikulum ini dilaksanakan ditengah pembangunan Indonesia yang sedang digencarkan saat itu. Pasca Orde Lama tumbang, Orde Baru melakukan konsolidasi dalam berbagai bidang. Satu diantaranya adalah pembangunan dilaksanakan secara sistematis melalui serangkaian Pembangunan Lima Tahunan (Pelita) dan berjangka dua puluh lima tahun berdasarkan arahan GBHN. Repelita I dalam PJP dimulai pada tahun 1969/1970. Agar pencapaian sasaran pembangunan dapat terwujud secara optimal, pembangunan saat itu didasarkan dalam kerangka Trilogi Pembangunan.<sup>6</sup> Pembangunan dalam bidang pendidikan juga diarahkan dalam konteks pembangunan nasional berdasarkan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dalam kurikulum 1984 ditegaskan, pendidikan harus mendukung pembangunan di segala bidang. Sebagai manusia pembangunan, anak didik harus memiliki jiwa patriotisme.

Salah satu diantaranya adalah sejak tahun 1984 mulai diajarkan pelajaran PSPB untuk seluruh jenjang pendidikan dari SD hingga SMA. Meski berbeda konteks dengan PSPB yang sama-sama menjadi artikulasi kekuasaan negara, pelajaran Sosiologi-Antropologi dalam kurikulum ini tidak mengalami indoktrinasi secara ideologis sama halnya dengan PSPB, pelajaran Sejarah maupun PMP (kini PKn). Pelajaran Sosiologi sejak pertama kali diajarkan lebih menjadi ranah kekuasaan dalam konteks diskursus pembangunan. Artinya, kekuasaan negara beroperasi dalam kurikulum Sosiologi-Antropologi melalui ideologi pembangunan. Beroperasinya kekuasaan tersebut akan dianalisa melalui beberapa materi yang tersaji dalam buku pelajaran Sosiologi SMA terbitan Galaxy Puspa Mega. Materi tersebut terkait dengan kekuasaan. Di bawah ini akan dijelaskan salah satu materi yang menjadi transformasi kekuasaan.

Tema : Masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika

Kelas : I

<sup>6</sup> Lebih lengkap lihat makalah Ginandjar Kartasasmita (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas era Orde Baru) *Tantangan dan Agenda Pembangunan Nasional dalam PJP Iidan Repelita VII*, disampaikan pada Silaknas V ICMI, 4 Desember 1996.



### **Frame GPM :**

GPM menjelaskan tema Masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika sebagai refleksi keanekaragaman yang ada di Indonesia. Keanekaragaman tersebut antara lain keanekaragaman kebudayaan, adat istiadat, tradisi, agama dan bahasa. Untuk membingkai keanekaragaman tersebut, Bhinneka Tunggal Ika menjadi payung bagi keanekaragaman tersebut. Tema ini terbagi atas beberapa sub bagian yaitu 1) Pengertian, 2) Sarana Pergaulan Antar Suku Bangsa yang Berbeda, 3) Usaha Mempersatukan Masyarakat yang Beraneka ragam.

### **Idea Element:**

Dalam pandangan GPM, Bhinneka Tunggal Ika merupakan satu prinsip dasar dalam membangun satu kesatuan masyarakat Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan dalam pandangan GPM:

“bukan hanya menekankan pada satu saja dan mematikan keanekaragamannya sebagai sumber yang sangat kaya, sebaliknya tidak pula menekankan keanekaragamannya dan mematikan kesatuannya.”<sup>7</sup>

Konsepsi Bhinneka Tunggal Ika itu direpresentasikan melalui Pancasila terutama sila ketiga dari Pancasila yaitu “Persatuan Indonesia” yang terkandung pokok pengertian mengenai “persatuan” dan “Indonesia”. Persatuan diartikan sebagai disatukannya berbagai corak yang beranekaragam ke dalam satu kebulatan yang utuh. Kata Indonesia mengandung pengertian bangsa dan juga pengertian geografis yaitu wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Kutipan teks diatas memperlihatkan adanya penekanan terhadap posisi Pancasila yang mampu merajut keanekaragaman masyarakat Indonesia. Pancasila juga dianggap sebagai solusi dalam mempersatukan masyarakat yang beranekaragam. Usaha menurunkan semangat Pancasila tersebut dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dilakukan melalui, sebagaimana dijelaskan GPM:

“persatuan Indonesia dapat diwujudkan antara lain dalam Wawasan Nusantara, pembinaan bahasa Indonesia, kepribadian nasional, kebudayaan nasional dan ketahanan nasional”<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Luth, Nursal dan Daniel Fernandez (1986). *Sosiologi dan Antropologi Jilid I Berdasarkan GBPP 1987*. Jakarta:Galaxy Puspa Mega, hal. 176

<sup>8</sup>Ibid. Beberapa konsep yang diintrodusir oleh pemerintah Orde Baru, 1) *Pembinaan bahasa nasional* merupakan bagian pembinaan bangsa. 2) *Kepribadian Nasional* merupakan sifat-sifat yang khas dari bangsa Indonesia yang tercermin dalam Pancasila. 3) *Kebudayaan Nasional* adalah perwujudan perpaduan

Melalui Pancasila dan berbagai konsepsi lainnya dalam mengamalkan di kehidupan sehari-hari, masyarakat dituntut meminimalisir segala sesuatu perbedaan yang dianggap mengganggu persatuan nasional. Persatuan nasional merupakan tujuan akhir dari seluruh praktek pembangunan yang sedang digencarkan saat itu. Hal itu beralasan dengan diberlakukannya kebijakan Asas Tunggal Pancasila. Keputusan itu tertuang dalam UU No. 8/1985 tentang Ormas dan diikuti dengan PP No. 18/1986, yang menyatakan bahwa semua organisasi sosial, agama, dan politik harus menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas ideologis dan filosofis mereka. Bagi organisasi yang menolak memasukkan Pancasila dalam AD/ART atau piagam, akan dilarang oleh pemerintah. Mengenai hal tersebut disampaikan juga oleh salah seorang penulisnya:

“materinya banyak membicarakan keberhasilan pembangunan diantaranya Swasembada Pangan. Tetapi tema utamanya banyak berbicara tentang ketertiban”<sup>9</sup>

Dengan menempatkan arti penting Pancasila, teks secara langsung memberi penilaian negatif bagi masyarakat yang tidak dapat mempersatukan perbedaannya dalam bingkai Pancasila. Kehadiran Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia dengan demikian dianggap sangat penting.

#### **Perangkat Pembingkai (*Framing Devices*)**

Ide atau pemikiran yang dikembangkan dalam teks berita itu didukung dengan pemakaian simbol tertentu untuk menekankan arti yang hendak dikembangkan dalam teks tersebut. Simbol tersebut digunakan untuk memberikan efek dan kesan penonjolan makna yang disajikan. Simbol dalam teks ini melalui gambar Pancasila. Adanya gambar Pancasila dianggap sebagai suatu strategi wacana untuk menekankan makna atau mengedepankan pandangan tertentu agar lebih diterima oleh khalayak. Dalam teks GPM, perangkat pembingkai itu paling tidak dipakai untuk beberapa tujuan. *Pertama*,

---

unsur-unsur kebudayaan daerah. 4) *Ketahanan Nasional* adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang merupakan integrasi dan kondisi-kondisi tiap-tiap aspek dari kehidupan bangsa dan negara yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan dari dalam atau dari luar, yang langsung atau tidak langsung membahayakan kehidupan nasional, 5) *Wawasan Nusantara* yaitu cara bangsa Indonesia memandang diri serta alam sekitarnya yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk mewujudkan pembangunan nasional.

<sup>9</sup> Wawancara Drs. Daniel Fernandez, M.Si, 16 Mei 2008

memberikan citra positif terhadap keberadaan Pancasila sebagai simbol persatuan dan kesatuan. Dalam teks digambarkan, Pancasila sebagai solusi mempersatukan perbedaan dan keanekaragaman yang ada di masyarakat Indonesia. *Kedua*, perangkat pembingkai dipakai untuk memberi citra negatif terhadap perbedaan yang ada di masyarakat. Teks ini memperlihatkan bahwa perbedaan merupakan sesuatu yang tidak baik dalam masyarakat. Perbedaan yang ada dalam pandangan pemerintah ketika itu sebisa mungkin untuk dihindari. Sebaliknya, persatuan dianggap lebih baik dalam masyarakat.

**Gambar 4.5 Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa**



Sumber: Luth dan Fernandez (1986:175)

#### **Perangkat Penalaran (*Reasoning Devices*)**

Ide atau pemikiran yang dikembangkan dalam teks itu didukung dengan seperangkat penalaran untuk menekankan kepada khalayak bahwa teks tersebut benar. Dalam teks tersebut, perangkat penalaran disajikan dengan beberapa pola. Arti penting Pancasila ditekankan lewat *roots*: Pancasila penting agar masyarakat bersatu dan terintegrasi. Dalam pembangunan, dibutuhkan berbagai prasyarat dan kondisi yang kondusif agar tercapai tujuan pembangunan. Salah satu kondisi tersebut adalah terciptanya keteraturan sosial yang terjadi pada masyarakat. Keteraturan sosial tersebut diciptakan melalui Pancasila sebagai instrumen legal dan politik dalam mempersatukan seluruh kekuatan sosial, politik, dan masyarakat. Oleh karena itu teks ini sebenarnya hendak menegaskan dua pesan penting. *Pertama*, bahwa semua warga negara harus

menyukseskan pembangunan yang sedang dilaksanakan. *Kedua*, untuk menyukseskan pembangunan ketertiban sosial dan ketertiban politik menjadi syarat mutlak. Semua komponen bangsa dipaksa untuk menciptakan keteraturan sosial dan ketertiban politik.

*Reasoning* ini menunjukkan bahwa semua masyarakat harus terlibat, mendukung dan menyukseskan pembangunan. Secara tidak langsung, teks ini juga menyampaikan pesan mereka yang tidak berpartisipasi dan tidak mendukung pembangunan maka dia juga tidak melaksanakan Pancasila dan UUD 1945. Singkatnya, pembenar itu dipakai untuk menekankan partisipasi, dukungan masyarakat terhadap pembangunan sebagai bagian mengamalkan Pancasila dan UUD 1945. Indonesia sebagai negara yang baru merdeka harus mengejar berbagai ketertinggalan akibat penjajahan yang dilakukan ratusan tahun. Satu-satunya solusi yang paling tepat adalah dengan pembangunan. Teks ini menekankan bahwa pembangunan merupakan solusi terbaik bagi negara-negara bekas jajahan. Dengan demikian dapat tercapai tertib sosial dan tertib politik<sup>10</sup>. Perangkat penalaran juga dipakai untuk merespon mereka yang menafikan persatuan dan kesatuan. Lahirnya UU No. 8/1985 menunjukkan betapa kuatnya posisi Pancasila sebagai simbol pemersatu bangsa. Dibawah ini disajikan kerangka analisis :

<b>Frame:Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa</b>	
<i>Framing Devices</i> (Perangkat Pembingkai)	<i>Reasoning Devices</i> (Perangkat Penalaran)
<i>Metaphors</i> : “bagaimana perbedaan-perbedaan itu dapat tetap mempersatukan bangsa kita dalam persatuan yang indah, seindah kesatuan warna-warni yang serasi”	<i>Roots</i> :Bersatu dalam keanekaragaman bukanlah pekerjaan yang sulit karena bangsa Indonesia telah ditempa oleh perjuangan dan sejarah yang panjang untuk bersatu.
<i>Catchphrases</i> :”Persatuan dan Kesatuan”	<i>Appeals to principles</i> :Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang bersatu
<i>Depiction</i> :Bangsa kita adalah bangsa yang senantiasa mencari dan menyukai keserasian dan keselarasan	<i>Consequences</i> :perbedaan dalam masyarakat harus dihindarkan
<i>Exemplar</i> : Bahasa nasional sebagai salah satu sarana pergaulan antar suku bangsa yang berbeda	
<i>Visual images</i> :Lambang Pancasila	

<sup>10</sup>Konsep ‘tertib politik’ dijelaskan oleh Mas’oed sebagai relasi antara penciptaan strategi pertumbuhan ekonomi dengan stabilitas politik. Lihat Mas’oed, op.cit, hal. 131.

#### 4.3 Penutup: Teks sebagai Representasi Kekuasaan

Uraian diatas menjelaskan bahwa materi-materi yang terkandung dalam buku pelajaran Sosiologi SMA 2006 dan 1984 terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Buku teks pelajaran yang dianalisa berdasarkan Kurikulum 2006 merupakan produk BSNP. Wacana keteraturan social sebagaimana menjadi wacana dominan dalam Kurikulum 2006 tidak lagi berbicara praktek dan ideologi pembangunan yang diusung oleh penguasa. Namun demikian, berdasarkan Standar Isinya, kurikulum 2006 tetap saja tidak lepas dari ranah kekuasaan. Kekuasaan negara direpresentasikan dalam terciptanya masyarakat yang harmonis, teratur dan seimbang yang mampu mengurangi potensi dan gejala konflik. Wacana keteraturan sosial ini berbeda halnya dengan Orde Baru. Sebaliknya, kurikulum 1984 lebih menekankan praktek pembangunan. Pada waktu itu, secara historis sejak tahun 1970-an setelah Orde Baru berkuasa, istilah 'pembangunan' dan 'ideologi pembangunan' telah menjadi 'agama baru'. Pembangunan telah menjanjikan harapan baru bagi perubahan dan perbaikan nasib hidup bangsa Indonesia yang telah porak poranda akibat kebangkrutan ekonomi peninggalan Orde Lama. Melalui pembangunan, Orde Baru berusaha memperoleh dukungan (*legitimation*) rakyat dengan menjanjikan kemakmuran. Sosialisasi dan internalisasi ideologi developmentalisme dilakukan dengan tiga mekanisme yaitu melalui : 1) regulasi, 2) media massa, 3) pendidikan/sekolah. Ideologi ini membentuk struktur yang menghegemoni kesadaran warga negara. Secara lebih lengkap perbedaan tersebut dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel 4.1**

#### **Konstruksi Wacana Dominan dalam Kurikulum 2006 dan 1984**

Kurikulum	Wacana Dominan
Kurikulum 2006	<p><b>1. Keteraturan Sosial</b> Keteraturan sosial dalam kurikulum ini dipahami sebagai terciptanya masyarakat yang menjalankan seluruh nilai, norma, pranata sosial dalam konteks masyarakat yang berubah pasca Orde Baru. Titik tekannya tidak berorientasi pada praktek pembangunan melalui ideologi <i>developmentalism</i>. Isu-isu kontemporer sudah diintrodusir: <i>good governance</i>, otonomi daerah, desentralisasi, dan sebagainya.</p> <p><b>2. Masyarakat Multikultural</b> Masyarakat multikultural dipahami sebagai sebuah realitas sosial atas keanekaragaman berbagai kelompok masyarakat yang memiliki karakteristik berbeda.</p>

Kurikulum 1984	<p><b>1. Keteraturan Sosial</b> Terciptanya masyarakat yang harmonis berdasarkan <i>social equilibrium</i> menjadi penting dalam praktek pembangunan yang sedang digencarkan oleh Orde Baru. Ideologi pembangunan menyebar melalui berbagai materi yang tertuang dalam pelajaran sekolah, terutama pelajaran sosiologi.</p> <p><b>2. Masyarakat Bhinneka Tunggal Ika</b> Konsep Bhinneka Tunggal Ika direpresentasikan melalui Pancasila terutama sila ketiga dari Pancasila yaitu “Persatuan Indonesia” yang terkandung pokok pengertian mengenai “persatuan” dan “Indonesia”.</p> <p><b>3. Nasionalisme</b> Wacana ini muncul di awal Orde Baru berkuasa seiring dengan cita-cita yang digariskan oleh Orde Baru. Nasionalisme dipahami dalam bingkai UUD 1945 dan Pancasila yang dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Nasionalisme juga dipahami melalui terciptanya partisipasi warga negara.</p>
----------------	---

